



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pelaksanaannya disusun melalui penetapan program-program prioritas. Program prioritas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang kemudian disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah pada tahun rencana. Dalam hal ini tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, perumusan prioritas pembangunan daerah sebagai kerangka dalam menyusun strategi pembangunan harus dilakukan secara cermat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan sebagai tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun RPJMD 2021 – 2026. Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 akan diarahkan dalam upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Dimana upaya pencapaian target sasaran pembangunan ini diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara rutin dan berkesinambungan melakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan beserta isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





4.1 Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan data hasil capaian dan target pada Tahun 2022 maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut.

1. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang masih belum kuat

Ada beberapa hal utama yang menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- 1) Perkuatan hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas bahan mentah/setengah (batubara, sawit, karet dan kayu lapis) yang masih tinggi.
- 2) Upaya meningkatkan struktur perekonomian daerah dari sektor-sektor yang berkelanjutan seperti pertanian dalam arti umum, perdagangan dan jasa, serta pengembangan pariwisata.
- 3) Belum maksimalnya potensi investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan.
- 4) Pengembangan UMKM pada berbagai sektor perekonomian.

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah

Salah satu isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah terkait dengan penyediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kalimantan Selatan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata-rata nasional. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas pendidikan
- 2) Belum optimalnya kualitas kesehatan
- 3) Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki SDM serta produktivitasnya yang masih rendah.
- 4) Masih adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Di samping itu, dengan berkembangnya Ibukota Nusantara dan bonus demografi yang diperkirakan pada Tahun 2025 – 2035 akan menjadi tantangan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan agar dapat berdaya saing dan memiliki kompetensi.





3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan yang Belum Merata

Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu isu strategis Kalimantan Selatan. Saat ini pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih belum merata. Hal ini cenderung disebabkan karena pembangunan masih berfokus pada daerah perkotaannya dan menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam pemenuhan infrastruktur yakni :

- 1) Adanya pembatasan kewenangan, sehingga ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah provinsi dan memerlukan kolaborasi yang intens antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Keterbatasan penganggaran oleh pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan alternatif pembiayaan lainnya.

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Kebencanaan yang belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 meningkat, namun terdapat penurunan capaian pada beberapa komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan cenderung masih tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk fokus penanganan terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Faktor pencemaran sungai yang mempengaruhi penurunan indeks kualitas air (IKA);
- Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
- Masih terjadinya banjir serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan;
- Konsep mitigasi bencana yang belum optimal.
- Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor





5. Belum Efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai personil yang memeberikan layanan publik, khususnya di daerah dari sisi kualitas dan kuantitas masih terbilang minim. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pencatatan BKD sebesar 63,68 dapat dikategorikan rendah. Sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi ASN agar tata Kelola pemerintahan dapat meningkat.

Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan Pemerintahan menjadi poin utama agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berbenah dalam upaya menjadikan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel disertai dengan modernisasi pemerintahan melalui perkuatan digitalisasi. Maka diperlukan peningkatan pengelolaan informasi publik serta pemanfaatan dan pengembangan media publik.

Di samping itu, kebutuhan akan penyediaan data-data yang berkualitas juga menjadikan hal ini sebagai sebuah isu yang penting. Ketersediaan data yang berkualitas akan menentukan kualitas sebuah perencanaan pembangunan. Untuk itu, kinerja Satu Data di Kalimantan Selatan juga harus ditingkatkan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD ini mengacu pada dokumen RPJMD 2021-2026 yang tertuang pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RKPD ini juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan RKP 2024

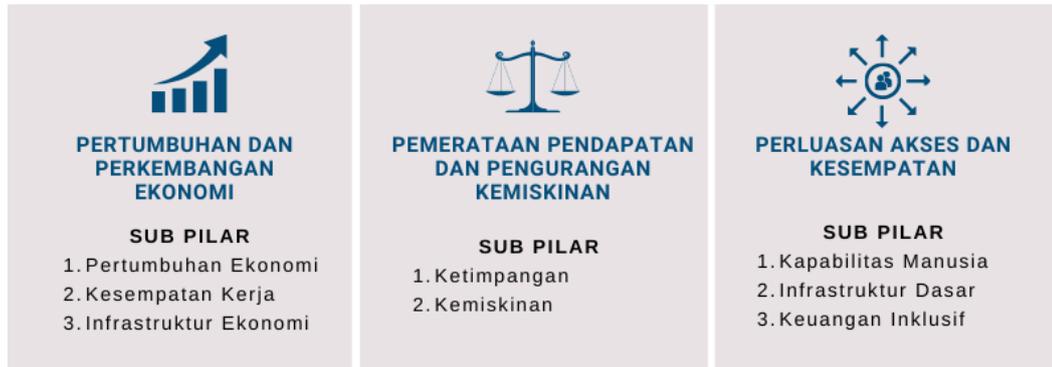
4.2.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap RKPD 2024

Untuk memastikan tujuan pada RPJMN 2020 – 2024 dan TPB/SDGs dapat berjalan secara efektif, maka perlu dilakukan upaya pendekatan pembangunan yang memuat perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, perkuatan integrasi sumber pendanaan, dan pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender melalui Pendekatan Perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial (THIS). Selain itu untuk menjamin pemerataan,





maka pendekatan pembangunan ekonomi secara inklusif dinilai mampu meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat secara terintegrasi dan komprehensif. Pembangunan ekonomi inklusif dinilai berdasarkan beberapa pengukuran indeks pembangunan ekonomi inklusif untuk mengukur dan memantau inklusivitas pembangunan di Kalimantan Selatan. Aspek untuk mengukur inklusivitas pembangunan ini mencakup 3 pilar, yaitu:



Gambar 4.1 Tiga Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas, 2018)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian :
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

4. Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara , yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Dukungan terhadap *Major Project (MP)*, antara lain:
- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.
- Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
 5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
 6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.
 7. Serta indikator lainnya yaitu terkait Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110 dan Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

4.2.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran SDGs Terhadap RKPd 2024

Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen RKPd Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 juga telah dilakukan melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPd Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu





pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang menjadi focus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada tujuan 4 Pendidikan yang berkualitas serta pada tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dua isu tersebut akan coba dijawab dengan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang memiliki tema Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, melalui beberapa prioritas daerah antarlain:

- A. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
- B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
- C. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
- D. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
- E. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

4.2.3 Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis terhadap RKPD Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen yang mengandung unsur kebijakan, rencana, dan program wajib. KLHS merupakan salah satu instrumen yang memiliki rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai salah satu instrumen

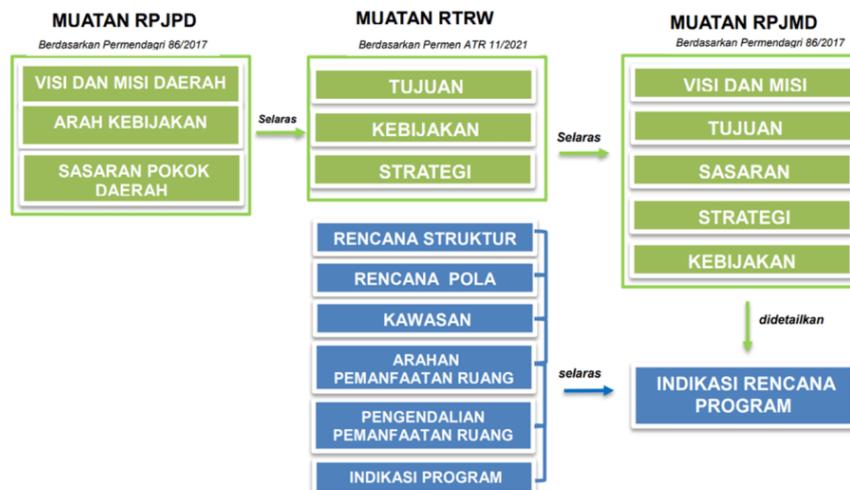




yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD. Arah kebijakan dan program yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

4.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap RKPD Tahun 2024

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bersifat spasial dan berimplikasi pada konsep keruangan. Dokumen RTRWP dapat menunjukkan dan memberikan arahan mengenai lokasi dari kegiatan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD yang tertuang pada indikasi program pemanfaatan ruang wilayah dengan pendetailan terkait program, arahan pembiayaan, serta lokasi program.

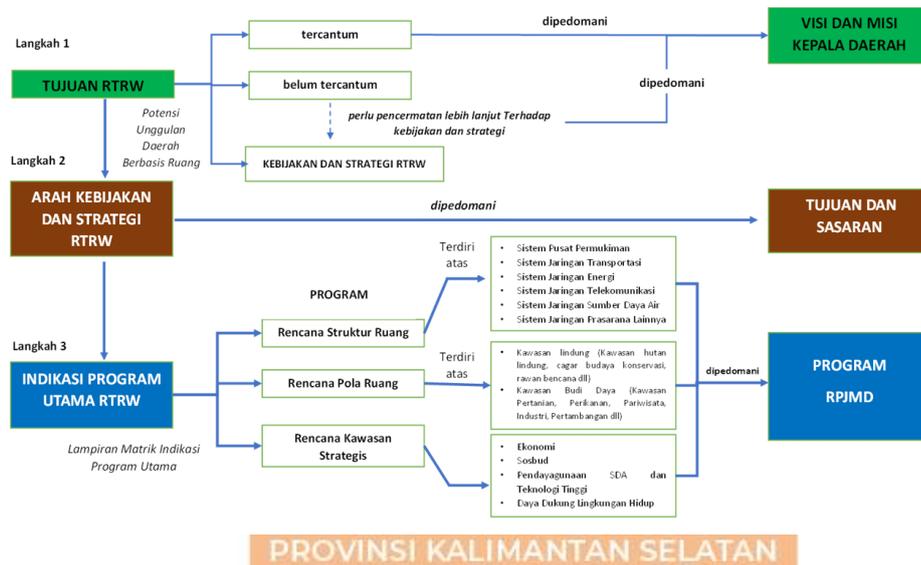




Gambar 4.2 Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Pelaksanaan RTRWP dan RPJPD sama-sama memiliki periode selama 20 tahun, sedangkan RPJMD memiliki periode selama 5 tahun. Pada tahap penyusunan RPJPD maupun RPJMD telah dilakukan penyalarsan muatan dengan RTRWP seperti yang disajikan pada Gambar IV.4. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RTRWP menjadi acuan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD. Dimana pelaksanaan RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan diterjemahkan ke dalam dokumen RKPD.



Gambar 4.3 Alur Langkah-Langkah Penyalarsan RTRW dengan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 yang mempedomani RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 melalui pencermatan dan sinkronisasi terhadap indikasi program utama RTRWP yang terbagi menjadi program pelaksanaan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya dan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRWP.





4.2.5 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Visi yang diusung dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”.

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun ke depan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.

Misi 1 dalam penjabaran visi Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pada peningkatan nilai-nilai masyarakat melalui keagamaan, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan, keterampilan, kepemudaan dan olah raga.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.

Misi 2 mengarahkan pembangunan yang merata melalui peningkatan nilai-nilai ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah industri turunannya (hilirisasi).

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.

Misi 3 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar dan ekonomi dengan berbasiskan kewilayahan yang mengintegrasikan wilayah daratan dan lautan Kalimantan Selatan.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.





Misi 4 dimaksudkan untuk menjamin kinerja birokrasi dapat berjalan secara transparan, efisien dan handal. Reformasi birokrasi pelayanan publik perlu ditingkatkan kualitasnya karena akan berpengaruh besar terhadap iklim investasi. Untuk itu, tata kelola pemerintah yang baik harus diimplementasikan pada berbagai skala ruang maupun fungsi.

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Dalam upaya menciptakan lingkungan dan hunian masyarakat yang nyaman dan aman dari bencana, maka diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi persoalan terkait sektor kebencanaan melalui bentuk-bentuk pengendalian untuk bencana banjir, pencemaran, maupun perusakan lingkungan, serta memperkuat ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon dan penanganan kebakaran hutan lahan berbasis teknologi.

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, adapun tahapan pembangunan pada Tahun 2024 memiliki arah kebijakan dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prasarana wilayah untuk mendukung sektor-sektor unggulan. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI									
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA									
MISI 1									
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur									
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	69,1	72,71	73,32	73,85	74,3	74,7	74,7
Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,91	71,28	72,46 71,70	72,95 72,20	73,44 72,65	73,98 73,05	74,41 73,50	74,41 73,50
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,29	8,34	8,47	8,56	8,65	8,74	8,83	8,83
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,68	12,81	12,94	13,07	13,2	13,33	13,46	13,46





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,66	68,83	70,64	71,05	71,46	71,99	72,3	72,3
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,86	88,91	88,97	89,04	89,1	89,16	89,23	89,23
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,48	74,44	75,39	76,33	77,27	78,21	79,15	79,15
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50,67	51,08	52	52,665	53,33	53,995	54,66	54,66
Menurunnya Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak (%)	16,24	16,26	15,01	13,77	12,53	11,29	10,04	10,04
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,11	69,87	69,89	69,91	69,93	69,95	69,97	69,97
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	58,64*	60,15	61,67	63,2	64,74	66,29	66,29
Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga (%)	N/A	N/A	35	37	39	41	43	43
	Jumlah Medali Emas (Buah)	N/A	45	30	40	50	35	45	200
MISI 2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata								
Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,81	2,1 - 2,6*	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-0,96	(-0,05) - 0,65*	0,65 - 2,5	1,5 - 3,45	3,15 - 3,95	3,5 - 4,2	3,75 - 4,75	3,75 - 4,75
	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	-3,38	1,81 - 2,15*	1,9 - 2,57	2,5 - 3,65	3,65 - 4,65	4,5 - 5,25	5,25 - 6,5	5,25 - 6,5
	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-3,38	0,76 - 0,9*	6,95 - 7,2	7,2 - 7,85	7,85 - 8,2	8,2 - 9,1	9,1 - 10	9,1 - 10
	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	-2,02	3,1 - 3,68*	6,18 - 6,61	6,61 - 7,1	7,1 - 7,8	7,8 - 8,25	8,25 - 9,1	8,25 - 9,1
Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	7,76	10,83*	11,66	12,55	13,52	14,55	15,67	15,67





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Persentase penduduk miskin (%)	4,38	4,83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
	Indeks Gini	0,332	0,33	0,328	0,326	0,324	0,322	0,31	0,31
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (%)	18,79	19,00*	19,29	19,79	20,29	20,79	21,29	21,29
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah per Orang per Tahun)	12.032	12.143	12.146, 875	12.208, 904	12.266, 652	12.320, 671	12.371, 414	12.371, 414
	Nilai Tukar Petani (%)	99,18	101,58*	102,23	102,7	103,18	103,69	103,8	103,8
Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71	3,71
Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,33	69,26	69,74	69,94	70,16	70,38	70,6	70,6
MISI 3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian								
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	0,391	0,383*	0,375	0,367	0,359	0,351	0,343	0,343
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	67,56	76,57	79,33	81,21	85,21	87,04	88,26	88,26
Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67
Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang (%)	85	86	87	88	89	90	91	91
MISI 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47	70,85*	72,05	73,24	74,44	75,64	76,84	76,84





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,8*	3,85	3,95	4,05	4,15	4,2	4,2
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat SAKIP	BB	A*	A	A	A	A	A	A
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,03	2,85	3,1	3,25	3,4	3,55	3,65	3,65
	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71,17	72	75	78	80	82	82
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Prima (4,51)	Prima (4,52)	Prima (4,53)	Prima (4,54)	Prima (4,54)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	74,05	79,48*	79,49	79,5	79,51	79,52	79,53	79,53
MISI 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana								
Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,43	70,26*	70,58	70,9	71,22	71,54	71,86	71,86
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	48,48	49,84*	51,24	52,64	54,04	55,44	56,84	56,84
	Indeks Kualitas Air	51,67	55,90*	55,97	56,04	56,12	56,19	56,26	56,26
	Indeks Kualitas Udara	88,93	88,38*	88,5	88,63	88,73	88,85	88,97	88,97
	Indeks Kualitas Air Laut	64,19	68,69*	69,27	69,86	70,44	71,02	71,6	71,6
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	16,5	18	21	22,2	24,6	26,6	28,9	28,9
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	144,81	138*	138	135	132	129	126	126
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,47	0,51*	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,66

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024





Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026 sebagaimana disampaikan pada bahasan sebelumnya yaitu **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** dimana tema pembangunan yang diusung adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional”** dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan **“Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel”**. Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi:

**“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Tema Pembangunan tahun 2024 terdapat 2 kata kunci (*key words*). Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah**. Secara pengertian Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.





Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



Gambar 4.4 Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

4.3.1 Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

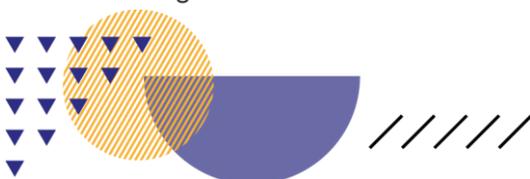
No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark





No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
		<ol style="list-style-type: none">4. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital5. Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda3. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS5. Pengendalian Prevalensi Stunting6. Penurunan Angka Pernikahan Anak7. Peningkatan Prestasi Olahraga8. Pengembangan Budaya Daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Reformasi Birokrasi2. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)3. Pelaksanaan Pilkada Serentak4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik6. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah.





Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana Tabel IV.2 kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.3.

Tabel 4.3 Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPd tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024		
				Target	Satuan	
1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,15 - 3,95	%	
			LPE Sektor Industri Pengolahan	3,65 - 4,65	%	
			LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,85 - 8,2	%	
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,16	%
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05	%
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark		LPE Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,10 - 7,80	%
				Kenaikan Jumlah Wisnus	10	%
				Kenaikan Jumlah Wisman	5	%
				Tingkat Hunian Akomodasi	48	%
		Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital		Pengeluaran perkapita	12.266,652	Ribu Rupiah per Orang
				Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	19,67	%
				Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	27,21	%
		Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah		Nilai Realisasi PMA dan PMDN	13,52	Triliun Rupiah
		Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN		Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1,39	%
				Padi	1.256.971	Ton
				Bawang	525	Ton
				Cabe Rawit	18.077	Ton
Cabe Besar	14.649			Ton		
Jeruk	121.265			Ton		
Produksi Daging	132.895			Ton		





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Produksi Ikan Tangkap	212.500	Ton
			Produksi Ikan Budidaya	177.272	Ton
			Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	82	Skor
			Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	399	Ton
			Persentase Peningkatan Lumbung Pangan yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	78,57	%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,65	Tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,33	Indeks
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,1	Indeks
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,27	Indeks
		Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	Usia Harapan Hidup	71,46	Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14	%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun	10,53	%
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang Berolahraga	39	%
			Jumlah Medali Emas	50	Buah
Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,2	Indeks		
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	85,21	%
			Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	100	%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	97	%
			Cakupan Pelayanan Persampahan	52,27	%
			Luas Genangan yang Tertangani	15,9	%
			RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	48,02	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19	%
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	28,84	%
			Meningkatnya cakupan masyarakat yang dapat menikmati listrik	99,61	%
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	89,04	%
			Wilayah Bebas Blankspot	92	%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	0,63	
			Tingkat Kemantapan Jalan	82	%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	51,78	%
			Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100	%
			Sarana dan Prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100	%
			Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	60	%
			Terangkutnya Penumpang dan Barang	77,5	%
			Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2	%
		Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,83	%
			Terwujudnya Pembangunan Kawasan - Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keuangan	85	%
			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	60	%
			Persentase Luas Sisa Areal HPL yang Dapat Dikembangkan oleh Pemda	60	%
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	74,44	Indeks
			Opini BPK	WTP	
			SAKIP	A	
			Indeks Profesionalitas ASN	78	Indeks





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
	Pelayanan Publik	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25	%
		Pelaksanaan Pilkada Serentak	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78,82	%
		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100	%
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	Indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Jumlah Jenis Data Statistik Sektorial yang Akurat	245	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93	%
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93	%
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9	Indeks
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,04	Indeks
			Indeks Kualitas Air	56,12	Indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,73	Indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	70,44	Indeks
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,6	
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,6	
			Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100	%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100	%
			Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	37,58	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,2	%

4.3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKP 2024 dan RKP 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai arahan bagi pembangunan nasional pada Tahun 2024, maka pemerintah pusat telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;





- 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan





- 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan





- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, maka telah dirumuskan program/kegiatan prioritas tahun 2024. Program prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berusaha untuk diselesaikan.

Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari program prioritas Nasional yang pada Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari 5 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas





pembangunan Nasional Tahun 2024. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Sandingan Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
		2	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah
1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		- Program Pengelolaan Energi Terbarukan
1.2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan		- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan
1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan		- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1.5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi		<ul style="list-style-type: none">- Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).- Pengembangan UMKM.- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrilisasi		<ul style="list-style-type: none">- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.- Program Pengendalian Izin Usaha Industri.- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.- Program Promosi Penanaman Modal.- Program Pelayanan Penanaman Modal.- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.- Program Pemasaran Pariwisata.- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Ekspor.- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
1.8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		<ul style="list-style-type: none">- Program Perekonomian dan Pembangunan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
2.1	Pembangunan Wilayah Kalimantan		<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.- Program Penataan Bangunan Gedung.- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.- Program Penataan Desa.- Program Peningkatan Kerjasama Desa.- Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate Dan Ibukota Negara Baru- Program Penyelenggaraan Jalan- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri- Program Pengelolaan Pelayaran- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.2	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Pendidikan- Program Pengembangan Kurikulum- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan- Program Pengembangan Bahasa dan Sastra- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3		3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
3.1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata Kelola Kependudukan		<ul style="list-style-type: none">- Program Pendaftaran Penduduk.- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		<ul style="list-style-type: none">- Program Pemberdayaan Sosial.- Program Rehabilitasi Sosial.- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
3.3	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta		<ul style="list-style-type: none">- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.- Program Perlindungan Khusus Anak.- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.- Program Pengelolaan Persampahan
3.4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Pendidikan- Program Pembinaan Perpustakaan- Program Pengembangan Kurikulum
3.5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan- Program pengelolaan Pendidikan.- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.- Program Perlindungan Khusus Anak.- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3.6	Pengentasan Kemiskinan		<ul style="list-style-type: none">- Program Pemberdayaan Sosial.- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
3.7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing		<ul style="list-style-type: none">- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.- Program Perencanaan Tenaga Kerja.- Program Pengelolaan Pendidikan.- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
4.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	4.1	<ul style="list-style-type: none">- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan- Program Pengembangan Kurikulum





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
4.2	Meningkatkan Kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengembangan Kebudayaan- Program Pembinaan Sejarah- Program Pengembangan Kesenian Tradisional.- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.- Program Pengelolaan Permuseuman
4.3	Memperkuat Moderasi Beragama		<ul style="list-style-type: none">- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.- Program Kesejahteraan Rakyat
4.4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas		<ul style="list-style-type: none">- Program Pembinaan Perpustakaan.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah
		6	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik
5.1	Infrastruktur Pelayanan Dasar		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase- Program Kawasan Permukiman.- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
5.2	Infrastruktur Ekonomi		<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Jalan.- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).- Program Pengelolaan Pelayaran.- Program Pengelolaan Perkeretaapian.- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
5.3	Infrastruktur Perkotaan		<ul style="list-style-type: none">- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5.4	Energi dan Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
5.5	Transformasi Digital		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
6.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian- Program Pengelolaan Hutan- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)- Program Pengelolan Persampahan- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.- Program Perencanaan Lingkungan Hidup- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6.2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengurangan Bencana- Program Penanganan Bencana- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.3	Pembangunan Rendah Karbon		<ul style="list-style-type: none">- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
7.1	Konsolidasi Demokrasi	7.1	<ul style="list-style-type: none">- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
			- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
7.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7.3	Reformasi Birokrasi dan tata Kelola		- Program Kepegawaian Daerah. - Program Penyelenggaraan Pengawasan. - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penataan Organisasi. - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7.5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional		- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

4.3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berbasis Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 yang melingkupi kebijakan pengembangan wilayah, struktur dan pola ruang. Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini terintegrasi dengan pelaksanaan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan periode kedua (Tahun 2020 – 2024). Pada periode kedua ini, berdasarkan hasil peninjauan kembali pada Tahun 2020 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dilakukan proses revisi dan integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Selatan.

Agar pembangunan dengan basis kewilayahan berjalan efektif maka diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah yang memiliki sistem yang saling terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota. Melalui konsep ini, dapat



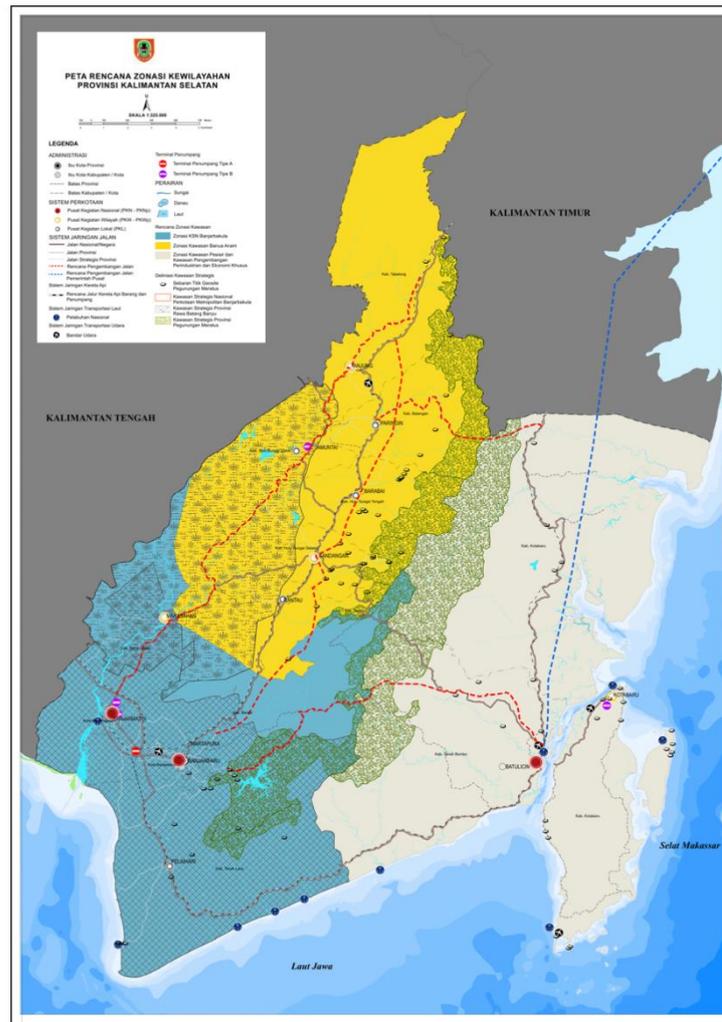


dilakukan pembagian 3 (tiga) zona pengembangan wilayah. Pembagian zona tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya aglomerasi pusat-pusat kegiatan, keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota yang dideliniasi berdasarkan batas administrasi wilayah serta sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan maupun potensi daerah masing-masing.

Adapun 3 (tiga) wilayah pengembangan tersebut seperti yang ditampilkan pada di bawah terbagi menjadi:

1. Wilayah Pengembangan Zona Perkotaan Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya.
2. Wilayah Pengembangan Zona Benua Anam..
3. Wilayah Pengembangan Zona Pengembangan Kawasan Pesisir, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.





Gambar 4.5 Konsep Pembagian Tiga Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan Berdasarkan Administrasi dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

4.3.4 Penelaan Terhadap Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPDP, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPDP serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan





Selatan Tahun 2024, masukan yang telah masuk dalam SIPD kemudian di seleksi berdasarkan kewenangan Provinsi yang kemudian akan dipilah berdasarkan prioritas.

Pada tahap Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini, usulan pikir yang diusulkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri mencapai 1.345 usulan. Usulan pikir tersebut dipilah berdasarkan prioritas dan kesesuaian kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rekapitulasi daftar pikir yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan

No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
1	Pendidikan Dan Kebudayaan	57	Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, renovasi bangunan sekolah, dan halaman sekolah. Selain itu usulan juga diarahkan pada upaya pembangunan SMA dan Sekolah Kejuruan pada daerah – daerah tertentu seperti di Desa Mulyoharjo, Desa Salino, Desa Mayangsari, Kelurahan Palambuan. Digitalisasi sistem pengajaran menjadi salah satu usulan yang disampaikan.
2	Kesehatan	30	Usulan berupa hibah provinsi dalam bentuk mobil ambulans, penyediaan dan distribusi alat kesehatan, peningkatan pelayanan rumah sakit untuk penyandang disabilitas fisik sedang dan berat, serta usulan pembangunan posyandu di Sungai Andai





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300	Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan serta perbaikan drainase jalan. Pada sektor sumber daya air usulan berfokus pada normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, perkuatan tebing/tanggul, pembangunan embung, dan pengaman pantai. Untuk mendorong pemenuhan infrastruktur dasar maka diusulkan pembangunan sarpras air bersih dan pemasangan pipa PDAM, bantuan pengelolaan persampahan dan pengadaan bank sampah,
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	90	Usulan didominasi dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni berupa kegiatan perbaikan/bedah rumah tidak layak huni. Untuk mendukung peningkatan kawasan kumuh dan pengembangan permukiman maka usulan berfokus pada perbaikan dan peningkatan jalan permukiman, rehabilitasi kantor desa, dan pemasangan pavingisasi halaman kantor desa. Selain itu terdapat beberapa usulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana
5	Perhubungan	90	Usulan didominasi dalam upaya penerangan jalan yang disesuaikan dengan kewenangan Provinsi. Selain itu usulan juga berupa rehabilitasi fasilitas keselamatan jalan, bantuan jukung pengawasan dan mesin penggerak, serta pembangunan dan perbaikan dermaga
6	Kehutanan	7	Usulan berupa pengadaan bibit tanaman. Selain itu terdapat usulan izin pemanfaatan hutan bagi masyarakat adat





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
7	Energi Dan Sumber Daya Mineral	30	Usulan berupa pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bantuan tiang listrik untuk penerangan jalan. Dari sisi kegiatan pertambangan, terdapat usulan untuk monitoring dan pengawasan terhadap limbah kegiatan,
8	Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dan Peternakan) dan Ketahanan Pangan	237	Pengusulan berupa pembangunan lumbung padi dan pengadaan sarana prasarana pertanian (hand tractor, traktor boat, pupuk, benih padi, bibit sawit, rondup) . Selain itu terdapat usulan perbaikan jalan usaha tani, jalan tani porous, dan jalan kebun. Untuk mendukung kegiatan peternakan diperlukan bantuan ternak sapi dan itik jawa
10	Kelautan Dan Perikanan	84	Usulan berupa bantuan alat tangkap ikan, mesin perahu dompeng, dan bibit ikan
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Pelatihan untuk anak remaja di Kota Banjarmasin
12	Kepemudaan dan Olahraga	21	Berupa Bantuan peralatan olahraga dan bantuan pengadaan sarana prasarana olahraga seperti seragam, net, bola pada cabang-cabang olah raga (Bola voli, Futsal, Sepak bola). Selain itu terdapat usulan pembangunan stadion dan gedung olahraga
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Berupa hibah kepada LSM, yayasan, dan DPD Persatuan Alumni Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Selatan
14	Kebencanaan	4	Usulan bantuan pengadaan sarana prasarana kebencanaan berupa perahu karet
15	Perdagangan	2	Kebutuhan operasi pasar untuk kebutuhan pangan di kawasan terpencil dan





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
16	Tenaga Kerja	9	Bantuan yang diusulkan berupa program pelatihan kerja untuk pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pelatihan bagi para pemuda putus sekolah dan masyarakat UMKM
17	Sekretariat Daerah	277	Bantuan pembangunan/rehabilitasi mesjid, mushola, TPA/TPQ dan panti asuhan. Untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat, maka terdapat usulan hibah untuk tempat ibadah
18	Komunikasi dan Infomatika	3	Usulan penguatan tata kelola komisi informasi publik
19	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Usulan pengadaan pasar murah di Wilayah Kemiri Sungai Andai serta pembinaan UMKM di desa, dan bantuan pengadaan bahan produksi kain sasirangan. Diperlukan juga diklat/pelatihan keterampilan wirausaha khususnya untuk remaja dan wanita untuk mendukung UMKM
20	Lingkungan Hidup	5	Usulan yang disampaikan sebagai upaya penanganan sampah berupa pengadaan TPA/TPS. Selain itu, diusulkan pembuatan saluran pembuangan limbah batubara di Desa Jelatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21	Pariwisata	13	Perlu penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan usaha untuk para ibu rumah tangga, remaja, kelompok desa. Serta dibutuhkan bantuan berupa mesin jahit dan dinamo. Untuk meningkatkan pemberdayaan kesenian masyarakat, maka dibutuhkan fasilitas kesenian kuda lumping
22	PMD	5	Usulan penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut
23	Pertanahan	2	Dukungan legalitas tanah di pedesaan dan sertifikasi lahan transmigrasi Angkatan Laut di Desa Abumbun Jaya





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
24	Sosial	47	Usulan bantuan usaha ekonomi produktif
25	Perindustrian	3	Usulan berupa hibah alat produksi (mesin pencetak bakso, mesin pemisah tulang, mesin pencetak sosis, mesin pengemasan plastik, mesin vakum, dan freezer box)
26	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12	Usulan berupa bantuan sarpras pemadam kebakaran (mobil pemadam, mobil unit pick-up, mesin pompa air, alat pemadam kebakaran, baju pemadam kebakaran) dan rehabilitasi posko BPK

4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tabel Inovasi Daerah

No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
1.	Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP)</p> <p>Merupakan Program Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP). Adapun penjabaran dari inovasi ini sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam upaya percepatan swasembada pangan khususnya sapi potong. Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalimantan Selatan melakukan program Integrasi Sawit-Sapi berbasis Kemistraan Usaha Ternah Inti Plasma (SISKA KU INTIP), telah mampu meningkatkan produksi anak sapi (padet) di Kalsel.• Dari populasi sapi di Kalsel sekitar 148 ribu ekor, selama ini menghasilkan anak sapi setiap tahun 22 ribu ekor. Tetapi setelah program SISKA KU INTIP tahun 2020 meningkat menjadi 27 ribu ekor, dan tahun 2021 naik lagi menjadi 30.500 ekor.• Program SISKA KU INTIP telah melakukan kajian sejak tahun 2016, dan hingga tahun 2024 mendapat support dari Australia serta mendorong peternak dan



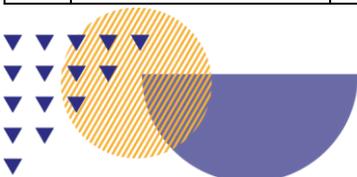


		<p>pekebun di Kalsel untuk melakukan integrasi sawit-sapi tersebut, karena terbukti mampu meningkatkan produksi anak sapi. Agar dapat mempercepat swasembada sapi potong 2026, dan menjadi pemasok sapi di wilayah Kalimantan, Program SISKU INTIP, dapat mendorong perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Karena sektor perkebunan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meraih devisa nomor dua di Kalsel setelah batubara.</p>
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Pemberian Penghargaan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan - Geospasial Banua Award</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Merupakan program pemberian penghargaan pertama pada tingkat provinsi di Indonesia untuk pengembangan simpul jaringan informasi geospasial pada tingkat SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan• Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial daerah dan mendukung percepatan satu data di Kalimantan Selatan• Ajang pemberian penghargaan ini dilaksanakan perdana pada Tahun 2022 dengan mengadopsi sistem penilaian Bhumandala Award.• Dengan adanya penghargaan ini, kinerja maupun komitmen SKPD provinsi sebagai unit produksi dan simpul jaringan kabupaten/kota meningkat secara drastis.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Sistem Informasi Bebrbasis Geospasial Terintegrasi (Sinbastertaskrim) Provinsi Kalimantan Selatan – SI PALUI EKSIS</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Merupakan program tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dimana Provinsi Kalimantan Selatan• Pelaksanaan pencapaian Kinerja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem agar lebih efektif dan efisien





		<p>diperlukan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang Terpadu dan Berkelanjutan melalui Sistem Informasi berbasis Geospasial Terintegrasi secara Vertikal dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seta secara horizontal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya. (Perbankan, Perusahaan Baznas, dan BPJS)</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan adanya program ini mampu mengintegrasikan (link) data geospasial dan program/kegiatan baik secara<ul style="list-style-type: none">○ Vertikal: pusat, provinsi, kabupaten/kota,○ Horizontal: SKPD dan Stakeholders lain (Perbankan, Perusahaan, Baznas, dan BPJS)○ Data program/kegiatan dan data kelompok sasaran dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem○ Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kalsel diatur melalui PERGUB No 076 Tahun 2022 Tanggal 30 November Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<p>PAMAN MAHAGA STUNTING</p> 
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>SIAP TPB (Sistem Aplikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs)</p> <ul style="list-style-type: none">• Penjabaran Inovasi• Sistem pelaporan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tepat• Menyediakan baseline data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah• Menyediakan data perkembangan tujuan pembangunan berkelanjutan daerah dengan Kemudahan updating secara timeseries dan terstruktur• Penyandingan data numerik dengan data geospasial untuk kemudahan analisa• Mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk pelaporan





6.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	SI KEPO (Aplikasi Kepuasan Pasien Online)
7.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	KTP SI BOS (Kendali dan Tatalaksana Pencegahan Karies dengan Boneka Sappy)
8.	Dinas Kesehatan	Monalisa (Mobil Analisa dan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Program Sungai Martapura Asri (Aman, berSih, Ramah, Indah)</p> <ul style="list-style-type: none">• Aman: memberikan rasa aman sebagai tempat berkehidupan (pengembangan transportasi dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan serta mampu untuk mereduksi banjir yang terjadi di kawasan sub DAS Martapura)• Bersih: bersih dari sampah dan sumber pencemar lainnya <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Merupakan program yang dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Sungai Martapura sebagai pusaka peradaban Banua dan bertujuan menjadikan Sungai Martapura yang aman, bersih, rapi, dan indah.
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>PAMAN MUDIK (Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan)</p> <p>RKPD TAHUN 2024 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>
11.	RSUD ULIN	SI PARAS (Sistem Pelayanan Apik, Ramah, Aman, dan Salam/Senyum)
12.	RSUD ULIN	SI SUSAN RAKAT (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)
13.	RSUD ULIN	SI LURAH MANDAM (Sistem Kelistrikan Rumah Sakit Yang Handal Tanpa Padam)
14.	RSUD ULIN	SI ICU (Sistem Informasi Intensive Care Unit)
15.	RSUD ULIN	WASEMO (Drainase Pleura dengan Water Sealed Drainage Modification)
16.	RSUD Ulin	SI WALUD (Sistem Informasi Kepegawaian Non ASN/BLUD)
17.	RSUD Ulin	SICAKEB (Sistem Catatan Asuhan Kebidanan)
18.	RSUD Ulin	APOTEKER PIAN (Aplikasi Penggunaan Obat bagi Tenaga Kefarmasian dan Pasien yang Informatif, Akuntabel dan Nyaman)





19.	RSUD Ulin	SI KAKA (Sistem Pelayanan Kecelakaan Kerja)
20.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Gerakan Revolusi Hijau Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none">Merupakan kegiatan penanaman dengan target 30.000 hektar per tahun yang dilaksanakan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat kekritisian lahan, meningkatkan produktivitas lahan
21.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Siforestka (Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan) Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none">Merupakan aplikasi yang menyajikan informasi dan data potensi sumber daya hutan dalam satu kesatuan sistem yang mampu memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kehutanan secara akurat baik data potensi sumber data hutan, peluang bisnis, perizinan, dan informasi kehutanan lainnya.
22.	RSJ Sambang Lihum	Bentuk Inovasi SI PAMAN JUARA (Strategi Peningkatan Kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Usaha dan Kerja Nyata)
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sistem Informasi Air Tanah Kalimantan Selatan SIATA KALSEL
24.	UPT Kebun Raya Banua	Interest Kebun Raya Banua (Integrated Ticketing and Reservation Sistem)





BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 serta RPJMD 2021-2026. Selain hal tersebut Penyusunan RKP 2024 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil masukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Pusat, masyarakat, dan masukan dari hasil proses perencanaan secara keseluruhan maka direncanakan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

6.1 Prioritas Dan Sub Prioritas RKP 2024

Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini mencakup program prioritas dan kegiatan prioritas, indikator kinerja serta pagu pendanaan indikatif Tahun 2024. Sesuai tema RKP 2024 **“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”** maka pada Tahun 2024 ditetapkan 5 Prioritas RKP 2024 dibagi menjadi 25 sub prioritas. Prioritas dan sub prioritas tersebut antara lain:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
Dengan Sub Prioritas pada RKP 2024 yaitu:
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing





Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
- c. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
- d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
- e. Pengendalian Prevalensi Stunting
- f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
- g. Peningkatan Prestasi Olahraga
- h. Pengembangan Budaya Daerah

3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
- c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi
- b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
- c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
- d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- f. Pengembangan Satu Data Kalsel

5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berdasarkan tema, sub tema, prioritas, dan sub prioritas di atas maka ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:





PRIORITAS #1 Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

1. Sub Prioritas Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 - d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 - e. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - f. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - g. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - h. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - i. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - j. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - l. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 - m. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - n. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - o. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 - p. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - q. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - r. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - s. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - t. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 - u. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
 - v. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN





- w. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - x. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - y. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 - z. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - aa. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
2. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - e. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3. Sub Prioritas Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
 - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - g. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - h. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
 - i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
4. Sub Prioritas Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI





- b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - f. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - g. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - h. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
 - i. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
5. Sub Prioritas Peningkatan Realisasi Investasi Yang Berdampak Ke Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
6. Sub Prioritas Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - g. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

**PRIORITAS #2 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**





1. Sub Prioritas Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2. Sub Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
3. Sub Prioritas Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4. Sub Prioritas Penurunan Penyakit Melalui GERMAS dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5. Sub Prioritas Pengendalian Prevalensi Stunting dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 - c. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - e. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - g. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM





- i. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - j. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - k. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - l. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - m. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - n. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
 - o. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
6. Sub Prioritas Penurunan Angka Pernikahan Anak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - d. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
7. Sub Prioritas Peningkatan Prestasi Olahraga dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
8. Sub Prioritas Pengembangan Budaya Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - d. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
 - f. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 - g. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

PRIORITAS #3 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH





1. Sub Prioritas Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - f. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 - g. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - i. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
2. Sub Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
 - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - c. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3. Sub Prioritas Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu gerbang IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
 - e. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 - f. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - g. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN





- h. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
- i. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
- j. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

**PRIORITAS #4 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK**

1. Sub Prioritas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- b. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
- c. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- d. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
- e. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
- f. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
- g. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
- h. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
- i. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
- j. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- k. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- l. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- m. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
- n. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- o. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- p. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
- q. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- r. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BLUD)
- s. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2. Sub Prioritas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dengan program prioritas sebagai berikut:





- a. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 - b. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - d. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3. Sub Prioritas Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - b. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 - c. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. Sub Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. Sub Prioritas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - b. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
6. Sub Prioritas Pengembangan Satu Data Kalsel dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - b. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

**PRIORITAS #5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA**

1. Sub Prioritas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan program prioritas sebagai berikut:





- a. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
 - d. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - e. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - g. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - h. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - i. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - j. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - l. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - m. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - n. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - o. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - p. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - q. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
 - r. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2. Sub Prioritas Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)





- b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- c. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
- d. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
- e. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- f. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- g. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
TEMA : Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif				
#01	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata			2.739.413.814.439
01.01	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.380.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.800.000.000	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.615.310.625	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	997.252.900	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	135.349.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.265.417.800	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	836.765.600		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	637.728.080		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	375.000.000		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	216.351.900		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	148.218.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	670.119.600		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.153.471.600		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000		
			01.02	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	354.315.000
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.521.122.700
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500					
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.555.220.200					
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.148.898.926					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035					
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.100.000.000					
01.03	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.283.078.400			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.424.616.400			
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.920.371.000			





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.282.295.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	3.024.458.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.357.613.206	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.090.000.000	
	01.04	Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5.780.337.792
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475			
	01.05	Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.163.635.100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				763.166.600	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				456.375.900	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	01.06	Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	184.980.700
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.380.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.292.407.000
#02	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing			2.181.886.339.255
02.01	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	752.950.400	
02.02	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	6.262.841.200	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	560.210.000	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
02	02.03	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522.978.800
	02.04	Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.261.513.200
	02.05	Pengendalian Prevalensi Stunting	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.078.522.800
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	35.082.008.801
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.828.127.660
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	77.030.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	789.813.300		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.202.409.300		





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	669.837.400
02.06	Penurunan Angka Pernikahan Anak		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	611.271.800
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	772.760.900
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	773.464.200
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	71.814.000
		02.07	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
02.08	Pengembangan Budaya Daerah		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.803.765.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.385.114.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	833.948.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.757.505.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	6.321.310.380
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.163.777.092
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.050.631.300
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	775.744.900
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	617.223.800
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.547.012.900
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.627.349.200
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	3.500.000.000
#03	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah			2.468.894.413.439
03.01	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.852.540.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.739.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.892.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.275.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.355.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.616.139.000
	03.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.616.139.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.155.089.200
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.498.515.700
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	350.000.000
	03.03	Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	10.700.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100.000.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	397.374.828.430
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.357.613.206
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.274.929.300
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.069.191.300
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	174.861.721.600
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	992.149.500
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.951.418.929	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			5.780.337.792	
PROGRAM PENATAAN DESA			168.655.600	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,			4.525.444.800	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	802.819.800
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	350.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.500.000.000
#04	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik			6.520.644.845.573
	04.01	Penguatan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.614.608.050
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.453.323.500
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.322.277.200
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.612.868.800
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.529.886.700
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.522.493.200
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15.611.867.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	13.362.125.966
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.855.621.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.626.231.622
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.996.904.322.236
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.000.191.450
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.419.821.900
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	106.959.795.200
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	582.282.800
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.532.660.600
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.796.633.274.256





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
04.02	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000
04.03	Pelaksanaan Pilkada Serentak		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	147.412.264.324
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	11.206.721.700
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.522.493.200
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.909.986.650
04.04	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.909.986.650
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.173.535.700
04.05	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.269.250.000
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	384.473.100
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212.545.800
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	758.348.150
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	136.095.450
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	162.509.600
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.600.000.000





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	04.06	Pengembangan Satu Data Kalsel	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	600.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
#05	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana			379.370.977.377
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.951.967.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.024.458.000
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.477.901.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.309.826.200
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.660.657.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.787.407.750
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	181.987.000
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	221.197.600
	05.01	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	961.043.000
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.233.473.500
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	278.480.500
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	957.762.100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	8.016.837.200





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
05.02	Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	500.000.000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.572.074.200	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	390.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100.000.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.275.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.390.720.100	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.033.689.200	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.507.135.800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800			

6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada perubahan susunan organisasi, tupoksi dan anggaran menjadi beberapa SKPD. Hal ini berakibat pada Perubahan Rencana Strategis Daerah (Renstra) pada Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah yang terjadi Perubahan yaitu:





1. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. BIRO HUKUM
3. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4. BIRO ORGANISASI
5. BIRO UMUM
6. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
7. SEKRETARIAT DEWAN
8. INSPEKTORAT DAERAH
9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10. DINAS KESEHATAN
11. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12. DINAS SOSIAL
13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
14. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20. DINAS PARIWISATA
21. DINAS KEHUTANAN
22. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
26. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2022 adanya perubahan nama dan penambahan pada Unit pelayanan teknis perangkat daerah yaitu:





1. UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN
2. PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Sehingga dari hal – hal diatas, terjadinya perubahan dan penambahan pada perangkat daerah yang menyebabkan adanya perbedaan antara rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Buku II RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Untuk pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2024 selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga dibiayai dari CSR, KPBU, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 bahwa jumlah ada 159 Program, 342 Kegiatan dan 1149 Sub Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD tahun 2024. Secara terinci dapat dilihat pada buku II RKPD tahun 2024.





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) di mana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena





“hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7.1. Indikator Makro Kabupaten/ Kota

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Memperhatikan dampak Pandemi COVID 19

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2024 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.





Tabel 7.1. Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Thn 2023 (RPJMD 2021-2026)	RKPD Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	Kalimantan Selatan	71,84	72,20	72,95	72,65
	Nasional (RKP)				73,99 – 74,02
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	Kalimantan Selatan	4,74	4,22	4,22	4,05
	Nasional (RKP)				5,00 – 5,7
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	Kalimantan Selatan	5,11	4,5 – 5,2	4,5– 5,2	4,6 – 5,0
	Nasional (RKP)				5,3 – 5,7
4	Tingkat Kemiskinan (%)				
	Kalimantan Selatan	4,49	4,60 -4,40	4,60 -4,40	4,40 -4,22
	Nasional (RKP)				6,50 -7,50
5	Indeks Gini				
	Kalimantan Selatan	0,309	0,326	0,324	0,324
	Nasional (RKP)				0,374 - 0,377
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)				
	Kalimantan Selatan	N/A	22,20	22,20	24,6
	Nasional (RKP)				27,02
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	Kalimantan Selatan	71,92	70,9	70,9	71,22
	Nasional (RKP)				69,48

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026

7.2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya disajikan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 35 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Target IKU dan IKD pada tahun 2023 menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2024. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) RKPD 2023 sebagai berikut:





Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,68	73,85	Biro Kesra, Bakesbangpol
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,84	72,65	Disdikbud, Dinkes, RSUD Ulin, RSUD MAS, RSJ Sambang Lihum, RSGM GHA
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	51,33*	53,96	DP3A, Dispora, Disdikbud, Dinkes, Disdukcapil KB, Disnakertrans, Diskop & UMKM
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,11	4,6-5,0	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dinas Perindustrian, Disdag, Dispar, Dishut, DPMPSTSP, Biro Perekonomian
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,49	4,40 -4,22	Dinas Sosial, Dinkop & UKM, DPMD, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Disdag, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dishut





No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	4,05	Disnakertrans, Dinas PUPR
7	Indeks Williamson	Indeks	0,383*	0,359	Dinas PUPR, Disperkim, Diskominfo, Disnakertrans, DESDM, DLH, Dishub
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,45	74,44	Biro Organisasi, Inspektorat, BPSDM, Diskominfo, Bappeda, Bakeuda, BKD, Satpol PP Damkar, Disdukcapil KB, DPMD, Dispersip, Biro Pem & Otda, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro PBJ, Biro Adpem, Sekrt DPRD, Balitbang, Badan Penghubung, Bakesbangpol.
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,92	71,22	DLH, Dishut, Dinas ESDM, Dislutkan
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	128,81	132	Dinkes, DPUPR, Disperkim, BPBD, Dinsos, Dishut
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	51,12	24,6	DLH, DPMD, Dinas ESDM, Dislutkan

7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan





gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan indikator kinerja nasional akibat dampak Pandemi COVID 19, indikator makro ditetapkan berdasarkan hasil analisis Kebijakan Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Tahun 2022. Selain itu indikator kinerja daerah yang ditetapkan disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan di mana 6 (enam) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

PRIORITAS I – Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Hasil Industri, UMKM, Pertanian dan Kelautan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark, Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital, Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah, Peningkatan Produktivitas Pertanian Sebagai Lumbung Pangan IKN. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Seluruh Aspek kesejahteraan masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Tenaga Kerja
 - ii. Pangan
 - iii. Koperasi dan UKM
 - iv. Penanaman Modal
 - b. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pertanian
 - iii. Pariwisata
 - iv. Perdagangan
 - v. Perindustrian
 - vi. Energi dan Sumber Daya Mineral

PRIORITAS II – Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Perencanaan





Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif, Penurunan Penyakit Melalui GERMAS, Pengendalian Prevalensi Stunting, Penurunan Angka Pernikahan Anak, Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Budaya Daerah. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
 - b. Indeks Gini
 - c. Tingkat Kemiskinan
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Pendidikan
 - ii. Kesehatan
 - iii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iv. Sosial
 - v. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
 - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Tenaga Kerja
 - ii. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - iii. Pangan
 - iv. Lingkungan Hidup
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - vi. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - vii. Kebudayaan
 - viii. Perpustakaan
 - ix. Kepemudaan dan Olahraga
 - c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pertanian

PRIORITAS III - Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah. Sub prioritas terdiri atas : Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar, Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai





pendukung pintu Gerbang IKN, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Indeks Gini
 - c. Tingkat Kemiskinan
 - d. Inflasi
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Kesehatan
 - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - iv. Sosial
 - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Lingkungan Hidup
 - ii. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - iii. Perhubungan
 - iv. Komunikasi dan Informatika
 - c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Perindustrian
 - ii. Energi dan Sumber Daya Mineral

PRIORITAS IV - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Sub prioritas terdiri atas : Penguatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN), Pelaksanaan Pilkada Serentak, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Indeks Gini
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat





- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Komunikasi dan Informatika
 - ii. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - iii. Statistik
 - iv. Persandian

PRIORITAS V - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Sub prioritas terdiri atas : Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Kesehatan
 - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - iv. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
 - v. Sosial
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Lingkungan Hidup
- c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Kehutanan
 - iii. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini





Tabel 7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
01.01	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,7	5,11	4,5-5,2	4,6, – 5,0
01.01.02	Laju Inflasi	%	2,7	6,99	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
01.01.03	PDRB Perkapita (ADHB)	(Juta rupiah/org)	N/A*	60,08	49,61 - 51,60	51,60 - 53,66
01.01.04	PDRB Perkapita ADHK	(Juta rupiah/org)	N/A*	34,04	34,16 - 35,70	35,70 - 37,56
01.01.05	Indeks gini	Indeks	0,374 - 0,377	0,309	0,326	0,324
01.01.06	Tingkat Kemiskinan	%	6,50 -7,50	4,49	4,60-4,40	4,40-4,22
01.01.07	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	18,34 juta-19,75 juta	201.950	195.068*	194.437*
01.01.08	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	N/A*	12.469.000	12.208.904	12.266.652
01.02	Fokus Kesejahteraan Sosial					
01.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99-74,02	71,84	72,95	72,65
01.02.02	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,16	13,1	13,07	13,2
01.02.03	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	14,16	8,46	8,56	8,65
01.02.04	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A*	69,13	71,05	71,46
01.02.05	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	7	eppbgm : 6,6 SSGI : 9,8	8	7
01.02.06	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,00-5,7	4,74	4,22	4,05
01.02.07	Jumlah Pengangguran	Orang	NA*	89.470 - 104.025	89.896 - 104.464	86.275 - 100.733

* Keterangan : 01.02.04 (Angka Harapan Hidup) N/A* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

▼ Keterangan : N/A* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
2	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Pelayanan Urusan Wajib Dasar					
02.01	Pendidikan					
02.01.01	Jumlah Warga Negara Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	69,87	69,43	100
02.01.02	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100	33,53	35,02	100
02.01.03	Rata – rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,83	65,88	2	71,99
02.01.04	Rata – rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,56	54,06	1,9	57,97
02.01.05	Rata – rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,18	62,72	2	68,49
02.01.06	Rata – rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54	52,60	1,9	56,43
02.01.07	Rata – rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,70	62,09	1,9	68,25
02.01.08	Rata – rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,79	58,65	1,8	68,25
02.01.09	Rata – rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,84	55,69	2	61,28





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,31	52,48	1,9	56,37
02.01.11	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,96	57,61	1,9	63,52
02.01.12	Rata – rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,61	44,98	1,8	48,71
02.01.13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK *(Persentas Lulusan SMK yang bekerja)	%	90	80,14	50,38	84,1
02.01.14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	N/A*	70	68,5
02.01.15	Iklm keamanan SMA	Nilai	84,78	81,29	2,47	88,07
02.01.16	Iklm keamanan SMK	Nilai	85,31	79,58	2,54	86,4
02.01.17	Iklm keamanan SDLB	Nilai	87,88	80,22	83,73	87,24
02.01.18	Iklm keamanan SMPLB	Nilai	85,73	78,5	81,93	85,36
02.01.19	Iklm keamanan SMALB	Nilai	84,25	75,8	79,17	82,54
02.01.20	Iklm kebinekaan SMA	Nilai	85,33	91,68	2,37	96,42
02.01.21	Iklm kebinekaan SMK	Nilai	86,67	90,29	2,42	95,09
02.01.22	Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	92,39	85,96	88,52	91,08
02.01.23	Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai	80,36	69,85	72,08	74,31
02.01.24	Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	78,51	73,95	79,17	78,31
02.01.25	Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	81,55	78,05	1,97	84,41
02.01.26	Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	80,82	76,06	26,06	82,38
02.01.27	Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	83,58	77,2	80,46	83,72
02.01.28	Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai	86,48	74,35	77,73	81,11

* Keterangan : 02.01.14 (Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK) N/A* pada Capaian Tahun 2022 : Tidak terdapat capaian karena hasil unduh rapor pendidikan belum menyertakan capaian pada indikator tersebut (terdapat kesepakatan bersama kementerian bahwa capaian-capaian indikator diprioritaskan mengambil di rapor pendidikan)



No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.29	Iklm inklusivitas SMALB	Nilai	85.98	69,6	72,96	76.32
02.02	Kesehatan					
02.02.01	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	100	100	100	100
02.02.02	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	47,5	90	90
02.02.03	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.04	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	95	80	76	79
02.02.05	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	%	7	7,22	8	7
02.02.06	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	Kab/Kota *Angka	474	6	6	7
	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.07	Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/Kota *Angka	405	10	11	11
02.02.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
02.02.9	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.10	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak dan	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
02.02.11	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	14	24,6	20	16
02.02.12	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	75	73	85
02.02.13	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	85,7	94	94,5
02.02.14	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/kota *Angka	405	10	11	11
02.02.15	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk *Angka	183	137	111	110
02.02.16	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.17	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Per 1.000	16	88,89% (10)	8	8
02.02.18	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	Kab/Kota *Angka	514	13	13	13
02.02.19	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,8	14,5	14	13
02.02.20	Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	%	75	92	69,2	76,9
02.02.21	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.22	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.23	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
02.03.01	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi	Km	35	6,6	1,295	1,7
02.03.02	Jumlah tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi	Orang	50	133	255	335
02.03.03	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	90	88,28	95.66	87
02.03.04	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	34125	78,43	104,77	136,84
02.03.05	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	143826	104,77	425	801,38
02.03.06	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase	100	83,34	94.26	80
02.03.07	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	9	1	2	2
02.03.08	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75	82	81	82
02.03.09	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase	100	88,68	94,34	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.03.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase	15	50,00	63,81	56,5
02.03.11	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	30,45	65,3	67,77	69,97
02.03.12	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
02.03.13	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	102	N/A	N/A	N/A
02.03.14	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	96	N/A	N/A	N/A
02.03.15	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	60	1	1	NA
02.03.16	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	58	N/A	1	2
02.03.17	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	6	6
02.03.18	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	Persentase	100	N/A	N/A	N/A
02.03.19	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
02.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
02.04.01	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	45,73	46,41	47,66
02.04.02	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas	Rumah Tangga	220.000	N/A	13.750	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)					
02.04.03	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	161.540	26.118	20.770	30.000
02.04.04	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10.000	N/A	N/A	N/A
02.04.05	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Unit	355.387	N/A	N/A	N/A
02.04.06	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	Unit	261.566	N/A	N/A	N/A
02.04.07	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	75.000	1.100	850	850
02.04.08	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	10	N/A	N/A	33,40
02.04.09	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	1.520,70	122,17	183,72	176,18
02.04.10	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	250.910	21.475	28.808	28.808
02.04.11	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
02.04.12	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	%	100	100	100	100





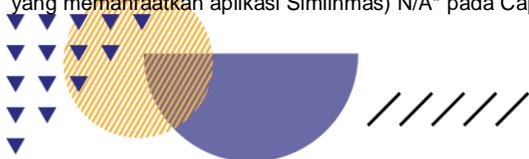
No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
02.04.13	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	70	N/A	43.75	N/A
02.04.14	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1.000	30,93	32	33,40
02.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
02.05.01	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/Perkada	10	8	2	10
02.05.02	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	%	100	100	100	100
02.05.03	Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	100	100	100	100
02.05.04	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Satgas Linmas	1	1	1	1
02.05.05	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.06	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	%	20	N/A*	20	20
02.05.07	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	50	80	85	90
02.05.08	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
02.05.09	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	20	14	14	14
02.05.10	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5	7	8	9
02.05.11	Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	%	30	100	100	100
02.05.12	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat	%	50	N/A*	50	50
02.05.13	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.14	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.15	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	25	0	25	25
02.05.16	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	40	0	7 orang	2 orang

* Keterangan : 02.05.06 dan 02.05.12 (Persentase Daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota dan Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas) N/A* pada Capaian Tahun 2022 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022



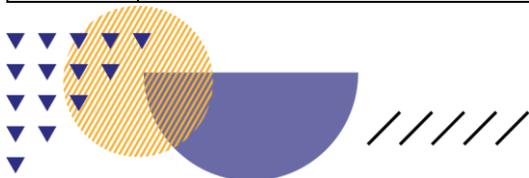


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.17	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	%	30	50	50	40
02.05.18	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
02.05.19	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	91,07	100	100
02.05.20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100
02.05.21	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
02.05.22	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
02.05.23	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.24	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.25	Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di prov/kab/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	25	100	100	100
02.05.26	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	25	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.27	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	orang	30	50	50	40
02.05.28	Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Jumlah Daerah	50	50	50	50
02.06	Sosial					
02.06.01	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.04	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.05	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.06	Persentase SDM PKH yang melaksanakan P2K2	%	100	445 keluarga	445 keluarga	445 keluarga
02.06.07	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	38	6	6	6
02.06.08	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial	KPM	7500	52	60	60





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.09	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	KPM	7500	39	55	60
02.06.10	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.11	Jumlah TJSLBU (tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha) yang mendapatkan penguatan	Badan Usaha	200	30	30	30
02.06.12	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.13	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Orang	135000	140444	14000	15000
02.06.14	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Paket	135000	200	250	250
02.06.15	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Orang	135000	142070	14000	15000
02.06.16	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Orang	10230	141	200	200
02.06.17	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	5000	133461	15000	15000
02.06.18	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100	100	100
02.06.19	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	7230	154	154	154





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.20	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Unit	514	2	2	2
02.06.21	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.22	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.23	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.24	Jumlah sdm kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan professional	Orang	2000	406	406	406
02.06.25	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.26	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	Kelompok Masyarakat	250	200	200	550
02.06.27	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	1000	100	100	100
02.06.28	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136	23	23	23
02.06.29	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	514	13	13	13





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.30	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	864	637	650	655
02.06.31	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	KPM	18800000	5000	5500	5500
02.06.32	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	31	20	30
02.06.33	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam pant	Orang	100	180	180	180
02.06.34	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	210	210	220
02.06.35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	100	100	100
02.06.36	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	3400	47	180	180
02.06.37	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	17	20	20
02.06.38	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100	50	10	20





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.39	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1360	54	54	60
02.06.40	Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2	11	5	11
02.06.41	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	50000	1626	600	500
02.06.42	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	333	511	511
02.06.43	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2720	9	10	10
02.06.44	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.45	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.46	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	100	100	100
02.06.47	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.48	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	180	180	180
02.06.49	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	2	39	50	40
02.06.50	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	40	100	40
02.06.51	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.52	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100	40	40	40
02.06.53	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	61	62	62
02.06.54	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	333	511	511
02.06.55	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	110	120	120
02.06.56	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Paket	68	70	60	70
02.06.57	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	31	47	47





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.58	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1700	114	160	160
02.06.59	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.60	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Paket	136	445	450	450
02.06.61	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340	239	511	511
02.06.62	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.63	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	25	32	20	32
02.06.64	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	50	100	100
02.06.65	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100	0	40	40
02.06.66	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	N/A	136	50	50	50
02.06.67	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.68	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	340	0	40	40
02.06.69	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100
02.06.70	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	26188	400	350	350
02.06.71	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Orang	6750	550	550	550
	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar					
02.07	Tenaga Kerja					
02.07.01	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	50000	5990	107.968	5700
02.07.02	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	33.33	23,73	75
02.07.03	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	325000	351	576	532
02.07.04	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	11.289.510	172.086	283.714	111.000





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.07.05	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	11.289.510	172.086	283.714	223.944
02.07.06	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	2.164.920	10	10	40
02.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
02.08.01	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	8,76	31,23	30	40
02.08.02	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	79,16	74,58	76,33	77,27
02.08.04	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64,34	61,23	68	65
02.08.05	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,30	88,86	89,04	89,1
02.09	Pangan					
02.09.01	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	91,18	82	84
02.09.02	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	30971	667,12	394	399





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.09.03	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	13.39	15.99	15.89
02.09.04	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	95.2	87.8	88.15	88.26
02.10	Pertanahan					
02.10.01	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	300614	6.164	6600	6600
02.10.02	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	130700	3000	4.400	4.500
02.11	Lingkungan Hidup					
02.11.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.74	71.97	70.90	71.22
02.11.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	70	98	100	100
02.11.03	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	100	100	100
02.11.04	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	76	N/A	1	1
02.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
02.12.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
02.12.02	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	99	94,54	98	99





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.12.03	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.04	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.05	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.06	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	19	30	80
02.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.13.01	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Orang	13.494	1723	1829	1863
02.13.02	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.03	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.04	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	6.444	100	130	180
02.13.05	Jumlah Desa Berkembang	Desa	59.291	892	655	562
02.13.06	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	9.152	34	9	0
02.13.07	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	10.000	107	20	450
02.13.08	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) berkembang	Bumdes Bersama	300	0	10	28
02.13.09	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju	Bumdes	1.800	20	5	41





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.13.10	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Maju	Bumdes bersama	200	0	1	3
02.13.11	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	58,7	67,51	68,84	70,71
02.14	Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana					
02.14.01	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	54,19	61	64,55
02.14.02	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	33,97	36	24
02.14.03	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,1	2,45	2,40	2,3
02.14.04	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,41	71,65	72	74
02.14.05	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,4	8,79	7,4	8,28
02.15	Perhubungan					
02.15.01	On Time Performance Layanan Transportasi	%	82,08	75,5	58,5	59
02.15.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88,5	78,9	81,5	81,7
02.15.03	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0.763	0,59	0,61	0,63





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.15.04	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	23.71	3,075	2,6	1,6
02.16	Komunikasi dan Informatika					
02.16.03	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	N/A	3	N/A
02.16.04	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	80	85	85
02.16.05	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	70	74	74
02.16.06	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
02.16.07	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	97	97	97





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.16.08	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	14	100	100
02.16.09	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	85	75	76	77
02.16.10	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	72	140	160
02.16.11	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	90	22	40	57
02.16.12	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	50	N/A	3	5
02.16.13	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase	100	22	40	57
02.16.14	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase	60	25	33	35
02.16.15	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase	100	14	100	100
02.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
02.17.01	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	10	26.87	30	7





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.17.02	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	20	11.57	15	7
02.17.03	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	0.46	0.65	4
02.17.04	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	75	15.32	16.22	18.02
02.17.05	Pertumbuhan Wirausaha	%	4	17,78	18,17	4
02.17.06	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	75	15,32	16,22	4
02.18	Penanaman Modal					
02.18.01	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.293 T	15.295.807.78 0.000	12,550,000,0 00,000	16,210,000,00 0,000
02.19	Kepemudaan dan Olahraga					
02.19.01	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	%	40	23,33	37	36,93
02.19.02	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	0	1	1
02.19.03	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,67	51,33	52,66	53,96
02.19.04	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
02.19.05	Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
02.20	Statistik					
02.20.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	%	100	87.50	92	92

Keterangan : 02.19.04 dan 02.19.05 (Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi dan Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi) N/A pada Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022 dan Target Tahun 2023



No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
02.20.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	16.67	15	15
02.20.03	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	16.67	50	50
02.20.04	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	87.50	92	92
02.21	Persandian					
02.21.01	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	32	N/A	N/A	1
02.21.02	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	80	N/A	4	4
02.21.03	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	50	N/A	4	4
02.21.04	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	100	N/A	64	65
02.21.05	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Orang	500	N/A	N/A	15





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.22	Kebudayaan					
02.22.01	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,04	1,80	1,90	2,98
02.22.02	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	61,62	21,06	24,00	30,7
02.22.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	50,00	39,00	40,00	42,00
02.22.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	15,00	8,35	6,93	11,99
02.22.05	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	23,06	21,68	15,63	21,83
02.22.06	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,50	1,00	2,00	0,5
02.22.07	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,56	11,06	12,36	30
02.23	Perpustakaan					
02.23.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	64,95	46	68,00
02.23.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	15	75,71	61	77,00
02.24	Kearsipan					
02.24.01	Jumlah Pemerintah Daerah Povinsi yang menerapkan e-arsip terintegrasi	Provinsi/Kab/Kota	158	62	62	70





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.24.02	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi/Kab/Kota	32	8	5	5
02.24.03	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	23	25	20
02.24.04	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	452.194	400	4050	4100
02.24.05	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	738.836	1.350	1.501	1.651
Pelayanan Urusan Pilihan						
02.25 Kelautan dan Perikanan						
02.25.01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi	ton	21.430.000	130.355,18	167419	250.000
02.25.03	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	17.800.000	179.659,89	179.659,89	179.659,89
02.25.04	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.350.000	201.252	211.000	220.000
02.25.05	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	58.76	64,11	63.00	68.31
02.25.07	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1110	179	200	207
02.25.08	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2870	130	130	130
02.25.09	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.26	Pariwisata					
02.26.01	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,5	2,1	2,27	2,29
02.26.02	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000-3 15.000.000	2.924.434	3.300.000	3.630.000
02.26.03	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1500000000	13.342.961	10.000.000	11.000.000
02.27	Pertanian					
02.27.01	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	1.96	0.86	1.0	1.0
02.27.02	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	%	1,64	0,99	1,0	1,0
02.27.03	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah	%	1.82	1.02	1.0	1.0
02.27.04	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	%	3,89	2,50	2,50	2,50
02.27.05	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai	%	0.87	0.53	0.18	0.18
02.27.06	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	1,77	18,66	3,75	4,0
02.27.07	persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada	%	0,62	0,80	1,6	1,6



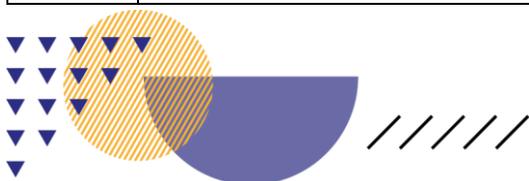


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.08	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis karet	%	1,62	-2,78	1,0	1,0
02.27.09	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	0,29	10,22	3,75	3,75
02.27.10	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	5,51	-2,73	1,0	1,0
02.27.11	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	%	0,24	6,74	3,90	3,90
02.27.12	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.710.620	83.223,07	128.749	132.895
02.27.13	Jumlah Produksi Susu	Ton	815.390	130	89	89
02.27.14	Jumlah Produksi Telur	Ton	6.465.230	58.952	61.945	62.118
02.27.15	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	45	0,55	2,46	2,46
02.27.16	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75,80	99,98	97,50	97,50
02.27.17	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	95	94,41	97,50	97,50
02.27.18	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	22,4	97,5	97,5





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.19	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	60,80	99,41	97,50	97,50
02.27.20	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	50	91.07	97.50	97.50
02.27.21	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	83.90	80.5	80.5
02.28	Kehutanan					
02.28.01	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	30000	15186.46	20000	20000
02.28.02	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	1500670.98	10275	3000	5000
02.29	Energi Sumber Daya Mineral					
02.29.01	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99	98.46	98.51
02.29.02	Rasio elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
02.29.03	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	19.5	15.79	19.56	19.58
02.30	Perdagangan					
02.30.01	Tertib Usaha	%	90	100	100	100
02.30.02	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	99.20	100	100
02.30.03	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	7.86	65.94	6.2	10
02.30.04	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	102.12	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.30.05	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	142.25	100	100
02.30.06	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5.9	0.015	0.10	0.11
02.30.07	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	105	100	100
02.31	Perindustrian					
02.31.01	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	8.40	3.31	5.21	5.67
02.31.02	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.90	11.39	13.45	13.62
02.31.03	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	181.59	15.90	10.78	11.24
02.31.04	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.94	199,118	307,496	320,820
02.31.05	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	613.85	2.58	1.19	1.28
02.32	Transmigrasi					
02.32.01	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10	73,15	54,27	55,48
02.32.02	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisas	Index	57.50	75,66	71,54	75,03
3	ASPEK DAYA SAING					





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
03.01.01	Nilai Tukar Petani	%	108	104,58	102.7	103.18
03.01.02	Nilai Tukar Nelayan	%	107-110	83,74	102,03	102,95
03.01.03	Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB ADHK)	Rasio	N/A*	0.194	0.195	0.196
03.01.04	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	N/A*	48,29	50.28	50.55
03.01.05	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	Rasio	N/A*	1,21	1.24	1.27
03.01.06	Rasio Elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
03.01.07	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	N/A	0.61	0.63
03.01.08	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	N/A	N/A	81.21	85.21
03.01.09	Konflik antar dan inter umat beragama yg ditangani	Kasus	0	0	0	0

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026, Rakortekrenbang Prov. Kalsel thn 2022 dan Permendagri No. 59 thn 2021

* Keterangan : N/A* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

RKPD TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

